

## **BAB V**

### **BERAKHIRNYA TII PADA MASA KARTOSUWIRYO**

#### **A. Akhir Gerilya TII di Jawa Barat**

Pertempuran pertama antara TNI dengan NII terjadi pada tanggal 25 Januari 1949 di daerah Antralina, Malangbong, Garut. Pertempuran ini melibatkan TNI Divisi Siliwangi Jawa Barat dan TII. Pada waktu itu Divisi Siliwangi yang baru tiba di daerah Jawa Barat telah disambut oleh TII yang mengajak mereka untuk bergabung dan mengakui NII. Namun ajakan tersebut ditolak oleh Divisi Siliwangi. Dengan ditolaknya ajakan tersebut pihak NII menyatakan bahwa Divisi Siliwangi yang baru tiba di Jawa Barat itu merupakan tentara liar.<sup>1</sup> Sementara Divisi Siliwangi menganggap NII dan TII sebagai musuh, bukan hanya bagi Divisi Siliwangi saja tetapi juga musuh bagi RI. Dengan ini maka TNI perlu melakukan penumpasan, baik terhadap NII maupun terhadap TII pada khususnya.

Pada awal tahun 1950 sampai 1952, TNI selalu aktif melakukan operasi penumpasan. Namun setelah tahun 1952 sampai dengan 1957, operasi-operasi yang dilakukan oleh TNI terhadap TII pada waktu itu hanya bersifat insidentil. Artinya bahwa operasi tersebut dilakukan hanya merupakan reaksi dari TNI apabila ada serangan dari TII yang menyerang pos-pos mereka. Operasi yang dilakukan oleh TNI juga masih bersifat konvensional. Artinya bahwa operasi

---

<sup>1</sup> Lia Rohmawati, "Peranan Divisi Siliwangi dalam Penumpasan Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat (1949-1962)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2004, hlm. 55.

tersebut dilakukan dengan menawarkan perundingan kepada TII. Dengan model operasi dari TNI yang bersifat insidental dan konvensional itu ternyata tidak dapat mengimbangi taktik gerilya TII yang menggunakan sistem diversifikasi. Sistem diversifikasi ini merupakan suatu sistem yang menggunakan taktik pengalihan perhatian musuh ke wilayah atau daerah lain untuk menyerang daerah sasaran. Akibatnya TII yang lebih menguasai medan gerilya dapat dengan mudah melakukan serangan-serangan terhadap TNI.

Sampai tahun 1957, pelaksanaan operasi penumpasan terhadap TII belum dapat berjalan dengan sempurna. Hal ini terutama karena belum adanya sifat mobilitas dari pasukan TNI. Gerakan operasi yang dilakukan TNI masih bersifat pasif-defensif, yakni masih menggunakan pos-pos penjagaan yang sifatnya menetap. Selain itu kemampuan teknis pasukan TNI masih terbatas karena belum adanya suatu taktik perang anti gerilya, sehingga TII dapat menguasai situasi. Akibatnya sebagian rakyat banyak yang memihak kepada TII karena adanya hubungan keluarga dan fanatik keagamaan.

Sikap TNI yang tidak melibatkan rakyat dalam melakukan penumpasan dianggap sebagai suatu sikap yang arogan. Hal ini menimbulkan rasa antipati terhadap TNI dikalangan penduduk. Penduduk Jawa Barat pada waktu itu masih kurang percaya terhadap Divisi Siliwangi dan juga tidak mau memberikan informasi mengenai keberadaan TII. Sebagian penduduk ada yang merasa takut memberikan informasi karena mereka takut mendapat ancaman dari TII. Sikap penduduk yang seperti itu menyulitkan Divisi Siliwangi dalam melakukan penumpasan. Gerakan operasi yang dilakukan oleh Divisi Siliwangi juga masih

bersifat lokal dan belum mempunyai suatu rencana pokok yang menyeluruh, sehingga gerakan operasi itu sebagian besar hanyalah menurut kebijaksanaan komandan-komandan operasi setempat.<sup>2</sup>

Cara operasi yang dilakukan oleh Divisi Siliwangi yang masih dilaksanakan dengan model insidentil, konvensional, pasif-defensif, lokal dan belum mempunyai suatu rencana pokok yang menyeluruh ini hanya memberikan kesempatan bagi TII untuk terus mengembangkan inisiatif gerilya yang bersifat diversifikasi itu. Pelaksanaan operasi dengan model tersebut di atas, masih terus dilakukan oleh Divisi Siliwangi sampai awal tahun 1959.<sup>3</sup>

Tingkat keberhasilan dari operasi penumpasan terhadap TII yang dilakukan oleh Divisi Siliwangi belum berhasil sesuai harapan. Bahkan keadaan menjadi semakin sulit. Teror dan perampokan terhadap rakyat oleh TII terjadi dimana-mana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampai dengan awal tahun 1959 operasi penumpasan terhadap TII belum dapat terkoordinasi dengan baik.

Tahun 1958 merupakan tahun kebangkitan kearah pemikiran siasat untuk memulihkan keamanan, terutama untuk daerah Jawa Barat. Hasilnya yaitu mengenai konsepsi perang wilayah. Konsepsi ini merupakan manifestasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap

---

<sup>2</sup> Disjarah TNI AD. (1985). *Penumpasan Pemberontakan DI/TII S. M. Kartosuwiryo di Jawa Barat*. Bandung: Disjarah TNI AD, hlm. 118.

<sup>3</sup> Disjarah TNI AD. (1972). *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat*. Bandung: Disjarah dan Fa Mahjuma, hlm. 237.

warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara.<sup>4</sup> Dasar pemikiran konsep perang wilayah itu yakni bahwa tanpa adanya bantuan aktif dari rakyat, pemberontakan DI/TII tidak akan dapat ditumpas. Untuk itu keadaan masyarakat harus distabilisasikan dengan cara berfikir yang konstruktif dan integrasi nasional perlu didukung untuk mencapai partisipasi yang aktif dari rakyat dalam tugas-tugas pertahanan.

Menurut konsep perang wilayah, angkatan bersenjata harus menjalin hubungan yang baik dengan rakyat setempat. Diantara angkatan bersenjata dan rakyat tidak boleh ada perbedaan dalam bidang pangan, akomodasi dan pelayanan kesehatan. Angkatan bersenjata juga harus membantu rakyat dalam membangun kembali daerah-daerah yang rusak berat karena gangguan keamanan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.<sup>5</sup> Rencana tersebut diharapkan akan mengakibatkan isolasi total dari gerakan Darul Islam dan akan memperkuat daya perlawanan rakyat.

Penelitian mengenai taktik anti gerilya terus dilakukan oleh ahli-ahli dari Divisi Siliwangi. Penelitian tersebut berhasil membuat suatu rencana operasi untuk menyelesaikan keamanan di daerah Jawa Barat. Rencana operasi itu dikenal dengan nama Rencana Pokok 2. 1. (R. P. 2. 1.). Sedangkan mengenai penyelesaiannya telah disusun Petunjuk Pokok Pelaksanaan Pemulihan Kemanan

---

<sup>4</sup> Dinas Sejarah Kodam VI Siliwangi, *Siliwangi dari Masa ke Masa*. Bandung: Angkasa, 1979, hlm. 306.

<sup>5</sup> Holk Harald Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwiryo: Langkah Perwujudan Angan-angan yang Gagal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 185.

(P4K), yang berdasarkan pada konsep perang wilayah dan merupakan suatu petunjuk untuk menggunakan seluruh sarana militer seefisien mungkin.<sup>6</sup>

Inti pokok pikiran dalam Rencana Pokok 2. 1. ialah untuk membatasi kemampuan bergerak lawan sehingga lawan terdorong ke dalam daerah-daerah tertentu untuk selanjutnya diselesaikan daerah demi daerah.<sup>7</sup> Konsepsi tersebut pada prinsipnya merupakan peningkatan dari pelaksanaan operasi yang telah dijalankan sampai tahun 1959. Operasi-operasi konvensional sebelumnya masih bersifat pasif dengan menggunakan sistem pos yang sifatnya statis, sehingga tidak dapat mengimbangi kekuatan gerilya TII yang menginduk dengan gerakannya yang aktif.

Untuk dapat melaksanakan Rencana Pokok 2. 1. maka pada bulan Desember 1959 dikeluarkanlah suatu rencana operasi yang menetapkan bahwa pemulihan keamanan untuk wilayah Jawa Barat akan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun, yakni sampai tahun 1965. Rencana operasi itu dinamakan Rencana Operasi 2. 1. 2 (R.O. 2. 1. 2). Kemudian pada bulan Februari 1961, dikeluarkan lagi Rencana Operasi 2. 1. 2. 1 (R.O. 2. 1. 2. 1). Operasi ini merupakan percepatan dari rencana operasi sebelumnya. Dalam rencana operasi ini jangka waktu pemulihan keamanan hanya sampai tahun 1962. Hal ini sesuai dengan Tri Program Pemerintah yang antara lain memerintahkan agar keamanan di tiap-tiap daerah dapat diselesaikan pada akhir tahun 1962, termasuk wilayah Jawa Barat. Sesuai dengan rencana-rencana operasi tersebut di atas maka wilayah

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

<sup>7</sup> Disjarah TNI AD. (1985). *op.cit.*, hlm. 129.

Jawa Barat dibagi dalam daerah-daerah operasi yang kemudian dibagi lagi sesuai dengan tingkat pemulihan keamanan. Pembagian daerah-daerah operasinya sebagai berikut.<sup>8</sup>

- a. Daerah Operasi A (DO-A), yaitu daerah yang keadaannya telah normal.
- b. Daerah Operasi B (DO-B), yaitu suatu daerah yang sudah dikuasai oleh TNI tetapi masih ada gangguan gerilya dari satuan-satuan TII.
- c. Daerah Operasi C (DO-C), yaitu daerah yang sepenuhnya masih dikuasai oleh TII.

Dalam pelaksanaan operasi dilakukan sistem isolasi total. Untuk melaksanakan sistem isolasi total ini dibutuhkan partisipasi aktif rakyat. Untuk itu sejak awal operasi digelar dikeluarkanlah instruksi untuk setiap anggota TNI agar tidak menyinggung hati rakyat setempat, terutama sama sekali tidak diperkenankan menimbulkan kerugian pada rakyat. Masing-masing komandan militer mengunjungi secara teratur para alim ulama di wilayah Jawa Barat dalam rangka mempererat hubungan dan menciptakan rasa saling pengertian. Dengan adanya tindakan positif dan disiplin anggota TNI terhadap peraturan-peraturan yang telah digariskan dalam pelaksanaan operasi tersebut maka TNI berhasil menguasai rakyat dan pada akhirnya rakyat memihak kepada TNI.

Operasi penumpasan dimulai dari daerah Banten. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kemungkinan pasukan TII menyeberang ke Sumatera. Pelaksanaan operasi untuk daerah Banten dipimpin oleh Mayor Sudarman

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

Banuali. Kabupaten lebak ditetapkan sebagai Daerah Operasi C 19. Oleh karena itu di daerah ini dilakukan isolasi total yang diselenggarakan menurut bentuk taktik Pagar Betis. Tugas selanjutnya diteruskan untuk mengadakan operasi di daerah kompleks Gunung Asepun, yang merupakan Daerah Operasi C 18. Dalam pelaksanaannya dikerjakan secara lebih efektif sehingga dalam waktu enam bulan satuan-satuan TII di daerah Banten telah berhasil dibersihkan.

Praktek Pagar Betis yang diterapkan dalam usaha pengisolasian gerakan DI/TII bertujuan untuk mendesak TII ke suatu daerah tertentu. Setelah kesatuan TII terdesak ke suatu daerah tertentu, maka daerah tersebut kemudian dilingkari dengan garis pertahanan Pagar Betis. Setiap 5 meter terdapat satu saung pos rakyat yang terdiri dari 5 orang yang tidak bersenjata. Pada setiap 5 sampai 10 saung pos rakyat atau setiap 20-40 meter, terdapat satu pos militer yang berkekuatan 3 pucuk senjata. Antara satu saung dengan saung yang lainnya, dipasang rintangan berupa tali yang digantungi dengan kaleng-kaleng kosong yang diisi dengan sejumlah bebatuan dan dipasang setinggi betis. Dengan ini akan timbul bunyi manakala tali itu tersentuh. Selain itu dipasang lagi satu tali setinggi pinggang yang dimaksudkan sebagai alarm yang ditarik pada saat terdapat bahaya menurut kode-kode tarikan yang sebelumnya telah ditetapkan.<sup>9</sup> Saung-saung pos rakyat tersebut diamankan oleh sejumlah satuan tempur yang terus menerus bergerak dalam rangka mencari kontak dengan lawan yang bertujuan untuk menghancurkannya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Holk Harald Dengel, *op.cit.*, hlm. 187.

<sup>10</sup> Lia Rohmawati, *op.cit.*, hlm. 66.

Gerakan operasi selanjutnya diteruskan di daerah Bogor yang terdiri dari tiga Daerah Operasi C yaitu 14, 15 dan 17. Gerakan operasi di daerah Bogor ini menggunakan operasi yang bersifat terbuka. Pimpinan operasi sering menggunakan rapat dengan para pejabat pemerintah, rakyat setempat, tokoh-tokoh alim ulama serta pejabat-pejabat yang mempunyai pengaruh. Gerakan isolasi total di daerah Bogor ini berkembang lebih lanjut dengan mendapat penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Teknik Pagar Betis di daerah Banten lebih dikembangkan lagi dalam gerakan operasi di daerah Bogor. Sistem Pagar Betis ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk pengerahan daya mampu wilayah yang inti pokoknya terletak didalam pembinaan wilayah.

Pengerahan rakyat dalam bentuk perang rakyat semesta merupakan tradisi yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam sejarah militer bangsa Indonesia. Operasi yang dilakukan dengan menggunakan sistem Pagar Betis ternyata merupakan cara yang tepat untuk menumpas TII. Dalam operasi yang dilakukan di komplek Gunung Gede dan Gunung Pangrango dengan pelaksanaan isolasi total telah terbukti hasilnya yaitu menyerahnya seorang tokoh TII yang bernama Zaenal Abidin alias Heru Cokro.

Dengan menyerahnya Zaenal Abidin menjadi awal kehancuran TII. Selain membeberkan informasi mengenai TII, ia juga memberikan masukan kepada pimpinan TNI tentang taktik dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka menghancurkan satuan-satuan TII secepat mungkin. Salah satu masukan yang ia berikan kepada pimpinan TNI yaitu mengenai perlunya diadakan blokade ekonomi terhadap TII. Zaenal Abidin juga mengakui bahwa hanya dengan isolasi



total pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo ini dapat dihancurkan.<sup>11</sup>

Dengan bekal informasi yang diperoleh dari Zaenal Abidin, TNI dengan kekuatan besar memuncakkan intensitas operasinya. Perkampungan yang letaknya di belakang pos-pos Pagar Betis tidak sedikit yang dibakar dan dihancurkan. Seluruh penduduk kampung-kampung tersebut diungsikan ke kota-kota, sehingga otomatis komunikasi dengan rakyat pendukung TII putus total. Teknik lain yang digunakan untuk memaksa anggota satuan TII menyerah yaitu dengan menduduki sawah yang dimiliki atau dikerjakan oleh kaum kerabat TII, sehingga hasil panennya ini tidak digunakan untuk memberi makan anggota satuan TII.<sup>12</sup>

Isolasi total yang telah berhasil diterapkan dalam operasi di daerah Banten dan Bogor, juga diterapkan dalam operasi di daerah kompleks Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu. Operasi di daerah Bandung ini ternyata berhasil dengan baik. Dari hasil operasi itu, Komando Daerah Militer VI Siliwangi lebih yakin akan manfaat operasi yang dijalankan dengan menggunakan isolasi total.

Gerakan selanjutnya diteruskan ke arah timur daerah Ciwidey yang termasuk ke dalam Daerah Operasi C 14. Di daerah ini terdapat satuan TII di bawah pimpinan Toha Mahfud. Setelah melakukan gerakan operasi di daerah Ciwidey ini, Divisi Siliwangi berhenti di daerah Pacet, Bandung Selatan, untuk

---

<sup>11</sup> Disjarah TNI AD (1985), *op.cit.*, hlm. 135.

<sup>12</sup> Amak Sjariffudin, *Kisah Kartosuwirjo dan menjerahnja*. Surabaya: Grip, 1962, hlm. 23.

menahan supaya TII tidak kembali ke arah Barat. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan R. O. 2. 1. 2 yang dipercepat dalam R. O. 2. 1. 2. 1, maka dikeluarkan tiga perintah operasi, yaitu.<sup>13</sup>

1. PO Cepat I-XII, dalam jangka waktu antara 1 Januari 1961-31 Januari 1962.
2. PO Brata Yudha I-IV, jangka waktu Maret 1962-Juni 1962.
3. PO Pamungkas I-IV, jangka waktu Agustus 1962-Januari 1963.

Percepatan pemulihan keamanan di Jawa Barat telah digariskan oleh pemerintah bahwa daerah Jawa Barat harus sudah tercapai seluruhnya pada akhir tahun 1962. Untuk melaksanakan hal tersebut maka Kodam VI Siliwangi mengadakan suatu operasi penentuan yang terakhir. Operasi tersebut diberi nama Operasi Brata Yudha yang mulai dilaksanakan sejak bulan April 1962. Dalam pelaksanaannya, Kodam VI Siliwangi dibantu oleh Kodam VII Diponegoro dari Jawa Tengah dan Kodam VIII Brawijaya dari Jawa Timur. Pelaksanaan operasi Brata Yudha ini dibagi dalam beberapa daerah pertempuran yaitu.<sup>14</sup>

- a. Kuru Setra I, DO C5, meliputi komplek Gunung Galunggung.
- b. Kuru Setra II, DO C8 dan 9, meliputi daerah Gunung Guntur.
- c. Kuru Setra III, DO C6, meliputi daerah Rangas dan Maroco.
- d. Kuru Setra IV, DO C12, meliputi komplek Cimareme.

---

<sup>13</sup> Disjarah TNI AD. (1985), *op.cit.*, hlm. 136.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

Pada awal Mei tahun 1962, pemimpin TII yang telah menyerah yakni Toha Mahfud, menyerukan kepada Kartosuwiryo, Agus Abdullah dan Adah Djaelani Tirtapradja untuk menghentikan perlawanan. Akhirnya pada akhir bulan itu juga, karena keadaan yang sudah tak dapat diperbaiki lagi tingkat keparahannya, Adah Djaelani Tirtapradja meletakkan senjata. Dengan menyerahnya Adah Djaelani Tirtapradja, tokoh penggerak utama TII tinggallah Agus Abdullah dan Kartosuwiryo beserta pengawalnya yang bernama Aceng Kurnia.

Gerakan operasi selanjutnya ditujukan untuk mencari tempat persembunyian pemimpin pemberontakan DI/TII yaitu Kartosuwiryo. Mulai tanggal 3 Juni 1962, kesatuan-kesatuan Batalyon 328 Kujang II Siliwangi dikerahkan di daerah-daerah operasi untuk mencari jejak TII. Dalam melaksanakan tugas operasi ini, kesatuan militer masih tetap mengikutsertakan seluruh rakyat untuk melaksanakan tugas Pagar Betis. Akhirnya Peleton II dibawah pimpinan Letnan Dua Suhandi dari kompi C Batalyon 328 Kujang II, telah berhasil melakukan pengepungan di daerah Gunung Geber, Majalaya pada tanggal 4 Juni 1962. Dalam pengepungan tersebut ditemukan gubuk-gubuk persembunyian TII yang didalamnya terdapat Kartosuwiryo, beserta putra dan juga pengawalnya yakni Mohammad Darda dan Aceng Kurnia. Di daerah Gunung Geber ini akhirnya mereka menyerah.

Tertangkapnya Kartosuwiryo dan sebagian besar pasukannya di daerah Gunung Geber tidak berarti keamanan di Jawa Barat telah pulih kembali. Beberapa anggota TII masih berkeliaran di hutan-hutan. Diantara anggota TII

yang masih berada di hutan yaitu Agus Abdullah (Panglima KPWB 1/Jawa dan Madura) dan juga komandan pengawalnya yang bernama H. Syarif alias Ghozin.<sup>15</sup> Untuk mengajak pasukannya yang masih berkeliaran itu maka Mohammad Darda mengeluarkan suatu pengumuman yang ditujukan kepada seluruh anggota TII pada tanggal 6 Juni 1962.<sup>16</sup> Seruan tersebut ditandatangani oleh Mohammad Darda. Ditentukan pula bahwa setiap anggota TII harus mendatangi pos-pos TNI terdekat. Sesudah dikeluarkannya seruan ini, sebagian besar anggota TII menyatakan kembali ke pangkuan RI. Akhirnya Agus Abdullah dan H. Syarif

---

<sup>15</sup> Irfan S. Awwas, *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia: Menguak Perjuangan Umat Islam dan Pengkhianatan Kaum Nasionalis-Sekuler*. Yogyakarta: USWAH, 2008, hlm. 267-268.

<sup>16</sup> Disjarah TNI AD. (1985), *op.cit.*, hlm. 144. Adapun isi dari pengumuman tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Saya Mohammad Darda, selaku Komandan Markas Bantala Seta atas nama dan atas perintah Bapak SM. Kartosuwiryo mengharap kepada saudara Tahmid Basuki, selaku Komandan Kala beserta seluruh rombongan yang bersama-sama agar segera turun mengikuti Bapak (SM. Kartosuwiryo)segera diterimanya seruan dan perintah ini.
- b. Semua tindakan saya dan tindakan saudara seluruh Jamiatul Mujahidin dipertanggungjawabkan sepenuhnya lahir batin dunia akherat oleh Bapak SM. Kartosuwiryo. Insya Allah, Amin.
- c. Perlu diketahui bahwa Bapak SM. Kartosuwiryo dalam kedudukannya sebagai imam, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia, sudah memerintahkan untuk menghentikan tembak-menembak antara pihak Panglima Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia dan pihak Tentara Nasional Indonesia. Dan bagi rombongan yang bersama saya, sudah dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 1962, jam 11.35.
- d. Agar dimaklumi bahwa Bapak SM. Kartosuwiryo bersama saya dan AAM beserta anak-anak sudah selamat berada di lingkungan RI dengan mendapat perawatan baik dan menggembirakan pada tanggal 4 Juni 1962, jam 12.00. Ibu pun, Dewi Siti Kalsum (Wiwi) sudah bersama Bapak tanggal 5 Juni 1962, jam 10.00.
- e. Semua itu berlaku bagi Pak Wijaya (tokoh DI/TII) dan semua Jamiatul Mujahidin. Insya Allah, Amin !
- f. Kami bersama Bapak menanti kedatangan saudara. Terima kasih.

alias Ghozin pun mematuhi seruan Mohammad Darda dan kemudian mereka berdua dijemput dengan sebuah helikopter di Gunung Ceremai (Majalengka) pada tanggal 1 Agustus 1962.<sup>17</sup>

Panglima Kodam VI Siliwangi, Kolonel Ibrahim Adji selaku komandan langsung yang memimpin Operasi Brata Yudha, menyerukan kepada setiap anggota TII yang masih berada di hutan agar segera turun gunung dan menghentikan setiap kegiatannya serta menyerahkan diri dengan membawa semua senjata dan alat perlengkapan lainnya demi keselamatan mereka dimasa kini dan dimasa yang akan datang. Selain itu ia juga telah memerintahkan agar pos-pos TNI menerima anggota TII yang turun dari persembunyiannya di hutan-hutan. Diantara anggota-anggota TII yang turut menyerahkan diri ini terdapat sejumlah remaja berusia 10 sampai 12 tahun dengan seragam lengkap TII dengan membawa senjata mereka.<sup>18</sup>

Setelah Operasi Brata Yudha dilaksanakan seluruhnya dalam bulan September 1962, yang berarti tiga bulan lebih cepat dari rencana awal, masih dilaksanakan operasi lanjutan yaitu Operasi Pamungkas. Operasi pamungkas ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa TII di seluruh wilayah Jawa Barat.

## **B. Dampak Adanya Kegiatan TII di Jawa Barat**

Pusat konsentrasi TII terletak di daerah pegunungan dan hutan-hutan yang membujur dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur dan melintasi

---

<sup>17</sup> Irfan S. Awwas, *op.cit.*, hlm. 268.

<sup>18</sup> Holk Harald Dengel, *op.cit.*, hlm. 195.

perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. TII menempati daerah di sekitar Gunung Galunggung, Gunung Guntur, Gunung Ceremai, Gunung Burangrang, Gunung Pangrango Gede, Gunung Kendang dan perbukitan-perbukitan kecil lainnya.<sup>19</sup>

Kegiatan rutin TII yaitu bergerilya dari suatu tempat ke tempat lain untuk menghindari pengejaran TNI dan melakukan perampokan yang disertai dengan pembunuhan dan pembakaran di desa-desa dan kota-kota di wilayah Jawa Barat. Perampokan bertujuan untuk mencari tambahan perbekalan dan dilaksanakan pada waktu malam hari. TII telah merencanakan dan memperhitungkan mengenai waktu dimulainya perampokan dan waktu saat meninggalkan daerah yang dirampok. Pada umumnya, perampokan yang dilakukan oleh TII mulai berlangsung pada pukul 19.00 dan berakhir sekitar pukul 04.00.<sup>20</sup> Sebelum fajar tiba TII harus sudah kembali ke pos-pos mereka di hutan. Hal ini untuk menghindari penyergapan TNI.

Mulai tahun 1950, TII menyerang desa-desa dan kota-kota yang berada di bawah lindungan pemerintah RI. Kesatuan-kesatuan TII masuk ke desa-desa untuk menagih pajak yang disebut Infaq dari rakyat<sup>21</sup>. Pada awal gerakan Darul

---

<sup>19</sup> Amak Sjariffudin, *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>20</sup> Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo*. Jakarta: Aryaguna, 1964, hlm. 170.

<sup>21</sup> Dalam mengatur administrasi keuangan NII, Kartosuwiryo telah mengatur seperti halnya administrasi dalam suatu negara. Salah satu ciri khas dari administrasi keuangan NII ini yaitu mendasarkan pada pemasukan uang ke dalam kas negara dari hasil pungutan uang rakyat, baik dengan cara paksaan, ancaman senjata atau bahkan dengan cara merampok. Disjarah TNI AD. (1985), *op.cit.*, hlm. 78.

Islam setiap orang yang membayar pajaknya masih diberikan bukti penerimaan yang dinamakan uang Infaq. Namun ketika semakin banyaknya rakyat di pedesaan tidak lagi sanggup menyerahkan sejumlah uang yang diminta, TII langsung masuk ke rumah-rumah penduduk dan secara paksa mengambil apa yang mereka butuhkan. Pada waktu itu TII juga masuk ke kota-kota besar dan menduduki kota-kota tersebut selama beberapa jam. Kemudian TII melakukan perampokan harta benda penduduk kota-kota tersebut. Diantara kota-kota yang menjadi sasaran TII ialah di daerah Priangan Timur seperti Tasikmalaya, Garut, dan Majalengka.

Pada tahun 1951, jalur transportasi di Jawa Barat semakin tidak aman. Kendaraan-kendaraan pada siang hari dari satu kota ke kota lainnya hanya dapat bergerak dalam konvoi karena takut akan dicegat oleh TII. Pada malam hari umumnya lalu lintas berhenti total, seperti jalur lalu lintas Bandung-Jakarta dan ke jurusan Serang. Semua kendaraan sesudah pukul 16.00 meninggalkan jalan-jalan tersebut dan memasuki kota-kota besar karena setelah itu kawasan ini dikontrol oleh TII. Beberapa angkutan truk, angkutan umum seperti bus dan taksi beserta penumpang-penumpangnya serta rakyat biasa dan bahkan anggota-anggota TNI beserta kendaraannya, dihadang, ditembaki, dibakar dan paling tidak harta benda mereka dirampas oleh TII.<sup>22</sup> Pada awal tahun 1952, pencegahan terhadap kereta api juga semakin meningkat. Mula-mula kereta api dihentikan dengan cara menanam tiang dengan bendera perang NII di tengah rel, akan tetapi pada akhir tahun ini kereta api dianjlokkan begitu saja.

---

<sup>22</sup> Amak Sjariffudin, *op.cit.*, hlm. 18.

Memasuki tahun 1953, situasi di bidang militer mulai banyak menguntungkan Gerakan Darul Islam. Pada waktu itu setiap terjadi pertempuran antara TNI dengan TII, rata-rata setiap hari ada seorang korban tewas di pihak TNI. Pada tahun tersebut kerusakan yang harus ditanggung oleh pemerintah RI diperkirakan sebesar Rp. 115.000 setiap harinya. Bahkan pada tahun 1954, kerugian akibat serangan-serangan yang dilakukan oleh TII semakin meningkat menjadi dua kali lipat hingga mencapai Rp. 82 juta.<sup>23</sup>

Penyerangan TII terhadap desa-desa dan kota-kota di Jawa Barat semakin meningkat pada tahun 1956. Pada bulan September, hanya dalam waktu 17 hari telah dibakar 254 rumah, 2 masjid dan sebuah sekolah di Tasikmalaya, dan pada bulan November sebuah kesatuan TII yang terdiri dari 320 tentara membakar lebih dari 100 buah rumah di daerah Tarayu, serta di wilayah Priangan Timur dalam waktu seminggu dibunuh 20 orang penduduk sipil, 3 orang diculik dan 373 rumah dibakar yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 2 Juta.<sup>24</sup>

Aksi teror TII terhadap rakyat Jawa Barat berlangsung terus. Sekitar awal tahun 1957 TII melakukan perampokan di desa Pacet, Bandung Selatan. Dalam aksinya yang berlangsung selama satu malam itu TII telah berhasil membunuh 2 orang penduduk sipil dan 5 rumah penduduk dibakar serta merampas sejumlah hasil pertanian seperti kentang, beras dan padi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Jumlah kerugian tersebut didasarkan atas nilai rupiah pada tahun 1954. Holk Harald Dengel, *op.cit.*, hlm. 146.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 152-153.

<sup>25</sup> Pinardi, *op.cit.*, hlm. 173.



Sesudah melakukan aksi-aksinya, kesatuan TII kembali ke pos-pos mereka yang berada di hutan. Pada waktu di pangkalannya ini TII menyusun sebuah laporan terperinci mengenai aksi-aksinya itu. Laporan tersebut dibuat dengan disertai sebuah daftar dari semua barang yang telah berhasil dirampok. Selain itu didalam laporan tersebut ada juga yang dicantumkan jumlah rumah yang dibakar serta musuh yang dibunuh. Salah satu isi laporan-laporan atau berita kemenangan TII tersebut pada umumnya berbunyi sebagai berikut.<sup>26</sup>

Gerakan-gerakan bulan September 1956.

- a. Kesatuan Resimen 21 TII, telah menyerang sebuah kota di daerah Kuningan. Hasilnya: 18 pucuk senjata, diantaranya 1 Bren Gun, 7,5 kg emas dan lain-lain sebagainya seharga 3 juta lebih.
- b. Gabungan kesatuan Resimen 21 dan Resimen 81 TII, telah menyerang sebuah pos musuh di Majalengka. Hasilnya: 27 pucuk senjata, diantaranya 2 buah Bren Gun.
- c. Kesatuan Resimen 41 TII, telah menyerang sebuah markas musuh di daerah Galuh, Ciamis. Hasilnya: 9 pucuk senjata, diantaranya 1 Bren Belgie.

Kerusuhan di Jawa Barat yang disebabkan oleh TII sebagai tulang punggung utama gerakan Darul Islam telah berlangsung lama hingga tahun 1962. Hal ini mengakibatkan kerusakan berat pada pembangunan di Jawa Barat. Produksi pertanian menurun tajam, penduduk desa banyak yang mengungsi ke kota-kota sehingga terjadi kepadatan penduduk di daerah kota dan infrastruktur di daerah

---

<sup>26</sup> Holk Harald Dengel, *op.cit.*, hlm. 153.

pedalaman mengalami kerusakan yang berat. Menurut pihak resmi hingga bulan Agustus 1962, kerugian material diperkirakan mencapai Rp. 650 juta dan jumlah korban penduduk terbunuh, luka dan yang diculik mencapai 22.895 jiwa.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 194.